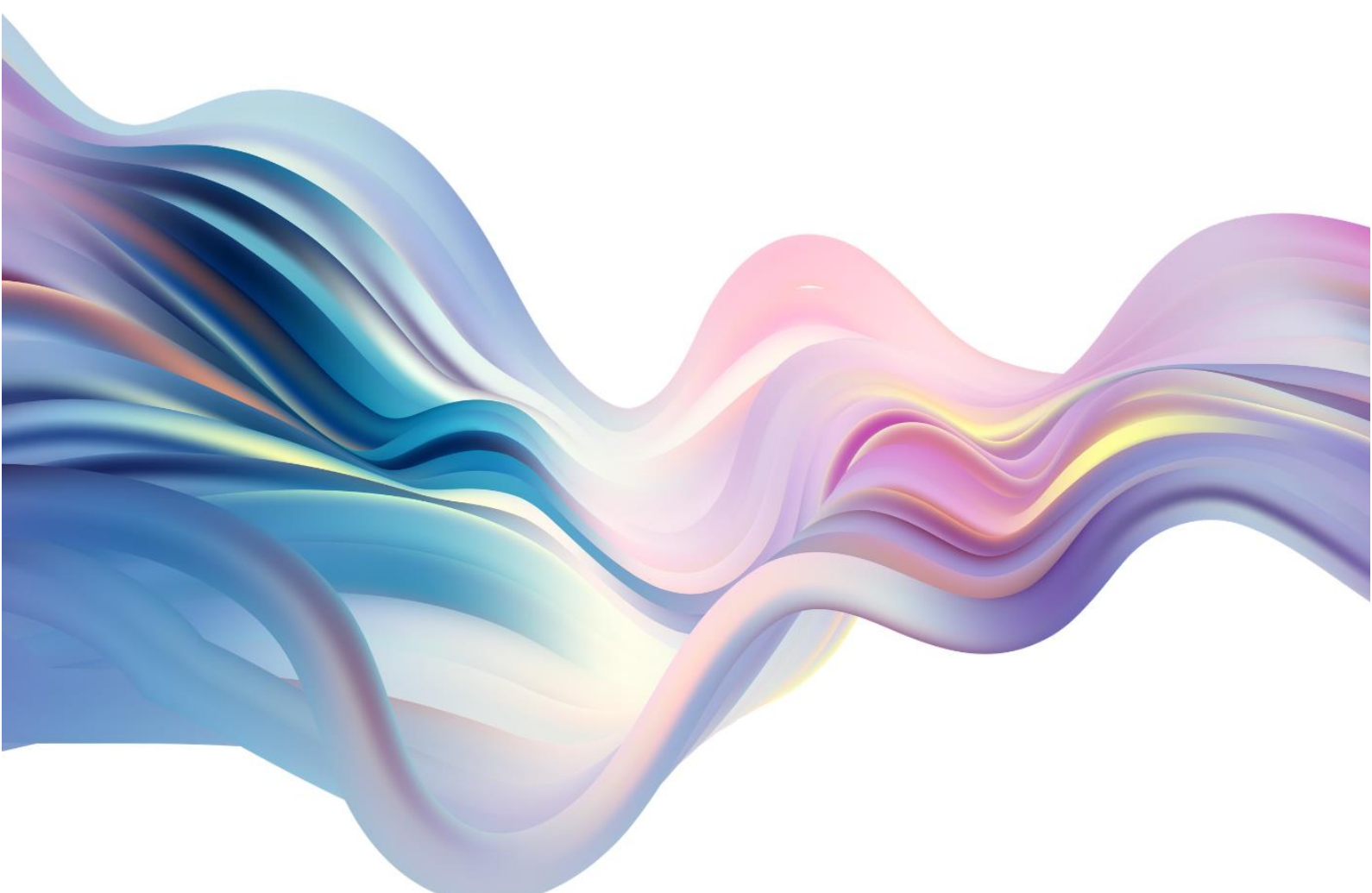




RENJA EVALUASI BIRO ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2025



Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua
Telp. 0967 537523, e-Mail: info@papua.go.id,
laman: <https://orpa.papua.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2025, ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat tujuan sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Renja ini merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan Renja perangkat daerah secara periodik/triwulan, yang nantinya akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja

Kami sadar bahwa laporan ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Biro Organisasi pada masa yang akan datang, kami berharap masukan dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Biro Organisasi kedepannya.

Jayapura, 23 Januari 2026



KEPALA BIRO

LINDA S.ONIBALA, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19270911 199112 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Metodeologi	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program / Kegiatan.....	7
2.1 Anggaran Belanja	7
2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Biro Organisasi.....	8
BAB III. Evaluasi Terhadap Rencana Kerja Dinas/Badan Tahun anggaran	
2025.....	13
3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	13
3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan...	14
BAB IV. Penutup	15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Dinas yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk /Badan menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta sebagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rancangan Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir
- e. Penetapan

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Biro Organisasi Tahun Anggaran 2025, kondisi Triwulan II ini dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

7. Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2025 tentang APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Papua nomor 1 tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil Renja Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam Renja Tahun 2025, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026.
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Renja Tahun 2025.
- d. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4 Metodologi

Metodeologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi Renja ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil Renja

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91% ≥ 100%
2	Tinggi	T	76% ≤ 90 %
3	Sedang	S	66% ≤ 75%
4	Rendah	R	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50%

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Metodeologi serta Sistematika Penulisan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2025.

BAB II Capaian Target Kinerja dan Penyerapan dana Program / kegiatan, menjelaskan tentang Capaian Target Kinerja, dan Pencapaian Target Kinerja APBD pada Lingkup Biro Organisasi Tahun Anggaran 2025.

BAB III Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2025, menjelaskan tentang Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Hambatan/ Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan.

BAB IV : Penutup

BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM / KEGIATAN

2.1 Anggaran Belanja

Pada tahun 2024, Biro Organisasi mendapat belanja yang mendukung Rencana Kerja melalui program/kegiatan/sub kegiatan sebesar Rp. **5.241.901.510,-** Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Pada Tabel. 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Uraian Belanja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2025 (F0)

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Selisih
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	(-/+)
1	a. Belanja Operasi	Rp. 3.866.223.520,-	Rp.3.551.882.720,-	Rp. 314.340.000,-
	b. Belanja Pegawai	Rp. -	Rp. -	Rp.-
	c. Belanja Barang & Jasa	Rp.		
	d. Belanja Hibah	Rp.		
	e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.		
2	Belanja Modal	Rp. 18.850.000,-	Rp. 18.850.000.-	-
JUMLAH BELANJA		Rp.3.885.073.520,-	Rp. 3.570.382.720,-	Rp.314.340.000,-

Berdasarkan data tersebut, pada Tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran sesuai Reviu dari Keuda dan Kemenkeu sebesar Rp.314.340.000,- dengan rincian sub kegiatan yang terjadi efisiensi, terdiri dari :

1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi, mengalami efisiensi sebesar Rp.65.856.000,-
2. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota, mengalami efisiensi sebesar Rp.185.095.800,-
3. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja, mengalami efisiensi sebesar Rp.2.250.000,-
4. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan, mengalami efisiensi sebesar Rp.38.799.000,-
5. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik, mengalami efisiensi sebesar Rp.22.340.000,-

Tahun 2024 realisasi belanja dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Uraian Belanja Biro Organisasi tahun anggaran 2024

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Selisih
		Sebelum perubahan	Sesudah perubahan	(-/+)
1	Belanja Operasi	Rp. 4.090.146.060,-	Rp. 5.241.901.510,-	Rp.1.151.755.450,-
	a. Belanja Pegawai	Rp.	Rp.	Rp.
	b. Belanja Barang & Jasa	Rp. 4.090.146.060,-	Rp. 5.241.901.510,-	Rp. 1.151.755.450,-
	c. Belanja Hibah	Rp.		Rp.
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp.		
2	Belanja Modal	Rp.		
JUMLAH BELANJA		Rp. 4.090.146.060,-	Rp. 5.241.901.510,-	Rp. 1.151.755.450,-

Memperhatikan data tersebut diatas pagu anggaran Biro Organisasi sebelum DPPA Tahun 2024 sebesar Rp. 4.090.146.060,- dan setelah perubahan DPPA Rp. 5.241.901.510,- ada kenaikan 22 persen sebesar Rp. 1.151.755.450,- bila dibanding Tahun 2025 dengan pagu anggaran setelah perubahan DPPA Rp. 3.570.732.720,- ada penurunan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 1.671.168.790,- atau sebesar 31,9 persen

2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD pada BIRO ORGANISASI

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Disamping itu, juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan seperti force majeure Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025. Adapun ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan kondisi sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL DETAIL REALISASI ANGGARAN 2025

No.	Kode Rekening	Nama Kegiatan	Anggaran (APBD)	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Silpa)	Tingkat Realisasi (%)
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 13,440,000.00	Rp 13,440,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 6,720,000.00	Rp 6,720,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6,720,000.00	Rp 6,720,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 825,180,000.00	Rp 813,744,080.00	Rp 11,435,920.00	98.61
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 18,850,000.00	Rp 18,850,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 18,000,000.00	Rp 18,000,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 184,594,000.00	Rp 180,252,900.00	Rp 4,341,100.00	97.65
	4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Rp 105,401,000.00	Rp 105,350,100.00	Rp 50,900.00	99.95
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 140,040,000.00	Rp 138,361,700.00	Rp 1,678,300.00	98.81
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 358,295,000.00	Rp 352,929,380.00	Rp 5,365,620.00	98.51
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 92,590,000.00	Rp 92,590,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 62,830,000.00	Rp 62,830,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 29,760,000.00	Rp 29,760,000.00	Rp -	100
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 62,260,000.00	Rp 57,304,666.00	Rp 4,955,334.00	92.04
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 62,260,000.00	Rp 57,304,666.00	Rp 4,955,334.00	92.04
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 748,361,720.00	Rp 741,213,847.00	Rp 7,147,873.00	99.04
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Rp 184,144,000.00	Rp 183,549,310.00	Rp 594,690.00	99.68
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Rp 314,655,500.00	Rp 313,835,427.00	Rp 820,073.00	99.74
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	Rp 249,562,220.00	Rp 243,829,110.00	Rp 5,733,110.00	97.71

4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Rp 1,820,901,000.00	Rp 1,816,946,750.00	Rp 3,954,250.00	99.78
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Rp 299,028,000.00	Rp 298,986,350.00	Rp 41,650.00	99.99
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Rp 299,942,000.00	Rp 297,348,340.00	Rp 2,593,660.00	99.14
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Rp 297,718,000.00	Rp 297,717,010.00	Rp 990.00	100
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tataaksana Pemerintahan	Rp 460,876,000.00	Rp 460,296,890.00	Rp 579,110.00	99.87
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 463,337,000.00	Rp 462,598,160.00	Rp 738,840.00	99.84
	TOTAL	Rp 3,570,732,720.00	Rp 3,543,239,343.00	Rp 27,493,377.00	99.23

Dari tabel diatas ini dapat diketahui bahwa Biro Organisasi Tahun 2025 melaksanakan : **2** Program, **7** Kegiatan dan **20** Sub Kegiatan , Perjanjian Kinerja Biro Organisasi disusun dengan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi dan RENSTRA , yang ditetapkan pada Tanggal 13 Pebruari 2024 dengan SK Kepala Biro Nomor 061/ 19.a/ Ro.Orgs, Penetapan Kinerja Kepala Biro Organisasi berisikan 8 (delapan) sasaran yang harus dicapai dengan pagu anggaran sebelum efisiensi anggaran oleh Kementerian BANGDA dan KemenKEU adalah sebesar Rp. 3.885.073.520,-, setelah diefisiensikan menjadi Rp.**3.570.732.720,-** ada pengurangan sebesar Rp. 314.340.800,- sebagai akumulasi dari rekening perjalanan dinas, pengadaan ATK dan pengadaan makan dan minum rapat.

Biro Organisasi melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Sub Kegiatan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan
Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

BAB III
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA
BIRO ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025

3.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Biro Organisasi dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Berikut ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Biro Organisasi Tahun Anggaran 2025 serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2024-2026 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Biro Organisasi telah melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan.

Pada tahun 2025 Renja Biro Organisasi pagu anggaran sementara sebesar Rp. 6.579.988.000,- dan setelah mendapat pagu indikatif Biro Organisasi mendapat pagu anggaran sebesar RP. 3.885.073.520,- kemudian melalui reviu Kementerian Keuangan Daerah dan Bangda pada bulan juni 2025 pagu anggaran Biro Organisasi menjadi Rp. 3.570.732.720,- karena adanya pemangkasan pada rekening belanja perjalanan dinas, makan dan minum dan pengadaan Alat tulis kantor. Jumlah pelaksanaan kegiatan sebelum perubahan 7 kegiatan setelah perubahan menjadi 6 Kegiatan, sedangkan jumlah sub kegiatan pada renja 25 sub kegiatan dan pada DPA Biro Organisasi menjadi 20 sub kegiatan hal ini berkorelasi dengan jumlah pagu anggaran.

Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 99,23 persen dibandingkan realisasi anggaran Tanun 2024 sebesar 99,30 persen ada penurunan. Begiupula dengan jumlah anggaran namun tidak mengurangi pelaksanaan TUSI organisasi, Biro Organisasi berusaha mencapai target walau ada beberapa Sub Kegiatan yang belum tercapai targetnya.

Tabel Renja Evaluasi 2025 dan Tabel Realisasi Anggaran Tingkat Program
Terlampir

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Yang Telah ditetapkan

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam hal pencapaian target kinerja Biro Organisasi tidak memiliki hambatan yang berarti, baik dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan begitu pula dalam penyediaan anggaran sesuai SPD yang diajukan ke BPKAD.

**TABEL
HAMBATAN DAN KENDALA**

TABEL IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PERMASALAHAN PELAKSANAAN RKPD 2025

No.	Prioritas Pembangunan/ Program /Kegiatan	Uraian Permasalahan	Kategori Masalah	Akar Penyebab (Rood Cause)	Dampak Terhadap Capaian Kinerja dan atau Anggaran
	Prioritas :				
	Dokumen sebagai panduan strategis dalam mengubah sikap, perilaku, dan kebiasaan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar selaras dengan nilai-nilai dasar (Core Values) BerAKHLAK Program : Penataan Organisasi Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1. Belum disusun RoadMap Budaya Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua 2. Survey Employer tidak dilakukan oleh KemenPANRB	Teknis Prosedur	1. Belum ditetapkannya Pedoman Roadmap Budaya Kerja oleh KemenPANRB sebagai pedoman dalam penyusunan RoadMap Budaya Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua 2. KemenPANRB tidak melaksanakan survey di tahun 2025	Telah dilakukan evaluasi budaya kerja secara mandiri dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua terhadap pejabat eselon IV dan III Realisasi Anggaran 100%

BAB IV

PENUTUP

Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini sebagai acuan untuk mengetahui sejauhmana program kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Biro Organisasi.

Oleh sebab itu betapapun sederhananya hasil evaluasi ini, namun diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program – program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dan dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam melakukan tugas pelayanan di bidang perhubungan terutama lalu lintas yang aman, nyaman, lancar, tertib, dan teratur.

Demikian Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil–hasil yang dicapai maupun kegagalan–kegagalan yang dihadapi akan menjadi cambuk bagi kami dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Jayapura, 23 Januari 2026



KEPALA BIRO

LINDA S.ONIBALA, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19270911 199112 2 001

TABEL RENJA EVALUASI BIRO ORGANISASI T.A 2025

Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi kinerja dan anggaran sd triwulan IV RENJA tahun 2025 (sesuai Capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD s/d triwulan tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran RENSTRA SKPD s/d Triwulan IV tahun 2025 (%)		SKPD Penanggung jawab	Loka sif/ Ket		
					6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		15=13/5 x100%				17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	15=13/5 x100%	17	18											
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		5,241,901,510	5,241,901,510	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	8,812,635,030	156								
	401	SEKRETARIAT DAERAH		5,241,901,510	5,241,901,510	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	3,570,733,520	8,812,635,030	156								
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase OPD dalam peningkatan pelayanan administrasi	1,772,143,160	1,772,143,160	1,001,470,000	0	38,461,195	143,299,723	985,078,746	985,078,746	2,757,221,906	156	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua											
	40.101.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi OPD dalam mendukung pelaksanaan TUPOKSI	0	0	13,440,000	0	-	0	13,440,000	13,440,000	13,440,000	0	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua											
	4.010.10.102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen	0	6,720,000	1 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	6,720,000	1 dokumen	6,720,000	1 dokumen	6,720,000	1 dokumen	6,720,000	1 dokumen	0	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua				
	4.010.10.106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	1 dokumen	0	6,720,000	4 dokumen	0	1 dokumen	0	1 dokumen	6,720,000	1 dokumen	6,720,000	1 dokumen	6,720,000	1 dokumen	6,720,000	1 dokumen	0	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua				
	40.101.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Biro Organisasi	0	0	8,000,000	0	-	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua											
	40.101.0205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	0	8,000,000	1 laporan	0	1 laporan	0	1 laporan	8,000,000	1 laporan	8,000,000	1 laporan	8,000,000	1 laporan	8,000,000	1 laporan	0	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua				
	40.101.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi OPD	1527,161,160	1527,161,160	825,180,000	0	37,011,955	138,824,723	813,744,080	989,579,998	2,516,741,158	165	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua											
	4.010.1106.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit	24,000,000	1 unit	24,000,000	1 unit	19,500,000	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	18,500,000	1 unit	19,500,000	1 unit	42,500,000	1 unit	177	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua			
	4.010.1106.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	24,000,000	12 paket	24,000,000	12 paket	18,000,000	12 paket	0	12 paket	6,000,000	12 paket	10,500,000	12 paket	18,000,000	12 paket	42,000,000	12 paket	175	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua			
	4.010.1106.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Pengadaan yang di	15 paket	520,115,620	15 paket	520,115,620	13 paket	184,594,000	13 paket	0	13 paket	0	13 paket	180,252,900	13 paket	180,252,900	13 paket	700,368,520	13 paket	135	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua			
	4.010.1106.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang di	22 paket	101,320,540	22 paket	101,320,540	56 paket	105,401,000	56 paket	0	56 paket	0	56 paket	105,350,100	56 paket	105,350,100	56 paket	206,670,640	19 paket	204	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua			
	4.010.1106.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas Tamu	2471 laporan	236,400,000	2471 laporan	236,400,000	200 laporan	140,040,000	200 laporan	0	200 laporan	0	200 laporan	136,361,700	200 laporan	136,361,700	200 laporan	372,761,700	200 laporan	158	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua			
	4.010.1106.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	645,325,000	30 laporan	645,325,000	30 laporan	358,295,000	35 laporan	0	35 laporan	310,111,955	35 laporan	128,324,723	35 laporan	352,929,380	35 laporan	512,265,298	35 laporan	179	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua			
	40.101.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang	87,750,000	87,750,000	92,590,000	0	0	-	92,590,000	92,590,000	180,340,000	206	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua											
	4.010.1108.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	laporan	63,750,000	laporan	63,750,000	3 laporan	62,830,000	3 laporan	0	3 laporan	0	3 laporan	62,830,000	3 laporan	62,830,000	3 laporan	126,580,000	3 laporan	199	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua			
	4.010.1108.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum	12 laporan	24,000,000	12 laporan	24,000,000	2 laporan	29,760,000	2 laporan	0	2 laporan	0	2 laporan	29,760,000	2 laporan	29,760,000	2 laporan	53,760,000	12 laporan	224	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua			
	40.101.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan dan penertiban administrasi	157,232,000	157,232,000	62,260,000	0	1,450,000	4,475,000.00	57,304,666	63,229,666	220,461,666	140	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua											
	4.010.1109.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	10 unit	157,232,000	10 unit	157,232,000	10 unit	62,260,000	13 unit	0	13 unit	1,450,000	13 unit	4,475,000.00	13 unit	57,304,666	13 unit	63,229,666	13 unit	140	Bagian Ketatalaksanaan	Prov Papua			
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : dana OTSUS Block Grant belum cair																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : Agar Biro Organisasi dapat diberikan tambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan TUPOKSI																										

Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d triwulan IV RENJA SKPD Tahun 2025 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d triwulan IV tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA Tahun 2024)		Tingkat capaian kinerja dan anggaran RENSTRA SKPD s/d triwulan IV tahun 2025 (%)		Lokasi
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		15=13/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase penataan Organisasi perangkat daerah	3,469,758,350	14,115,538,357	2,569,263,520	2,569,263,520	2,569,263,520	768,768,000	2,558,160,597	2,558,160,597	16,673,698,954	481	Kelembagaan	Bag									
	40.02.01	Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Fasilitas Kelembagaan dan Analisis	2,099,997,450	9,277,362,066	748,362,520	748,362,520	748,362,520	95,777,960	741,213,847	741,213,847	10,018,575,913	477	Kelembagaan	Bag									
	401021030.001	Facilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terwujudnya OPD Pemerintah Daerah yang tepat Fungsi dan tepat Ukuran	42 dokumen 350,000,000	42 dokumen 350,000,000	44 dokumen 184,144,000	44 dokumen 0	44 dokumen 0	44 dokumen -	44 dokumen 183,549,310	44 dokumen 183,549,310	533,549,310	44 dokumen	44 dokumen	Bag									Prov Papua
	401021030.002	Facilitasi Penataan kelembagaan Kabupaten Kota	Terfasilitasinya Pembinaan pengawasan kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	42 dokumen 600,000,000	42 dokumen 600,000,000	9 dokumen 314,656,300	9 dokumen 0	9 dokumen 0	9 dokumen -	9 dokumen 313,835,427	9 dokumen 313,835,427	913,835,427	9 dokumen	9 dokumen	Bag									Prov Papua
	401021030.003	Penataan Analisis Jabatan	Tersusunnya Jumlah OPD yang Memiliki Data Evaluasi	42 dokumen 1	42 dokumen 1,149,997,450	1 dokumen 249,562,220	1 dokumen 0	1 dokumen 0	1 dokumen 95,777,960	1 dokumen 243,829,110	1 dokumen 243,829,110	1,393,826,560	1 dokumen	1 dokumen	Bag									Prov Papua
	40.02.02	Facilitasi Reformasi Birokrasidan akuntabilitas kinerja	Facilitasi Penataan kelembagaan KabupatenKota	1,369,760,900	1,369,760,900	1,820,901,000	1,820,901,000	1,820,901,000	672,990,050	1,816,946,750	1,816,946,750	3,186,707,650	233	Kelembagaan	Bag									Prov Papua
	401021020.001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokras	Presentase Kab/kota yang Melaksanakan Reformas Birokrasi	1 dokumen 300,002,000	1 dokumen 300,002,000	1 dokumen 299,028,000	1 dokumen 0	1 dokumen 0	1 dokumen -	1 dokumen 298,986,350	1 dokumen 298,986,350.00	598,988,350	1 dokumen	1 dokumen	Bag									Prov Papua
	401021020.002	Monitoring dan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Penilaian PNPR prov Papua	Nilai "B" 299,999,900	Nilai "B" 299,999,900	1 dokumen 299,942,000	1 dokumen 0	1 dokumen 0.00	1 dokumen 261,969,340	1 dokumen 297,348,340	1 dokumen 297,348,340	597,348,240	1 dokumen	1 dokumen	Bag									Prov Papua
	401021020.003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Kerja pada SKPD Provinsi Papua	1 dokumen 99,999,900	1 laporan 99,999,900	1 laporan 297,718,000	1 laporan 0	1 laporan 0.00	1 laporan 62,899,010	1 laporan 297,717,010	1 laporan 297,717,010	397,716,910	1 laporan	1 laporan	Bag									Prov Papua
	401021020.004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Tersedianya Peta Proses Bisnis SKPD	1 dokumen 300,002,200	1 dokumen 300,002,200	1 dokumen 460,876,000	1 dokumen 0	1 dokumen 0	1 dokumen 153,123,350	1 dokumen 460,296,890	1 dokumen 460,296,890	760,299,090	1 dokumen	1 dokumen	Bag									Prov Papua
	401021020.005	Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	1 dokumen 369,756,900	1 dokumen 369,756,900	1 dokumen 463,337,000	1 dokumen 0	1 dokumen 0	1 dokumen 194,998,350	1 dokumen 462,598,160	1 dokumen 462,598,160	832,355,060	1 dokumen	1 dokumen	Bag									Prov Papua
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			Adanya Tim kerja, ketersediaan alat kerja, ketersediaan																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			Terlambatnya realisasi dana OTSUS																					
Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya			Agar Dana Otsus di turunkan sesuai jadwal/dipercepat																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya			Akan dipercepat SPJ belajar untuk mencapai realisasi																					

Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d triwulan IV RENJA SKPD Tahun 2025 (sesuai capaian APBD)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d triwulan IV tahun 2025 (%)		Ket
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		15=13/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			JUM LAH	5,241,901,510	5,241,901,510	5,241,901,510	0	86,431,195	912,067,733	3,543,239,343.00	3,543,239,343.00	3,543,239,343.00	67.59454248											
			Rata-rata capaian kinerja (%)																					
			Predikat kinerja																		Berhasil	Berhasil		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara



TABEL REALISASI ANGGARAN TINGKAT PROGRAM BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI T.A 2025

No	Kode & Nama Program	Anggaran (APBD)	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Silpa)	Tingkat Realisasi (%)	Kategori Realisasi	Analisis Singkat
1	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 1,001,470,000.00	Rp 985,078,746.00	Rp 16,391,254.00	98.36	Sangat Baik	1. Pelaksanaan review dari kementerian pusat/keuangan dan Bangda terhadap RKA dilakukan pada bulan Mei 2025 sehingga mengganggu jadwal/rengkas yang sudah dijadwalkan 2. Penyediaan anggaran OTSUS 1% terlambat
2	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Rp 2,569,262,720.00	Rp 2,558,160,597.00	Rp 11,102,123.00	99.57	Sangat Baik	
	JUMLAH	Rp 3,570,732,720.00	Rp 3,543,239,343.00	Rp 27,493,377.00	99.23	Sangat Baik	

Jayapura 23 Januari 2026



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.